



**ETIKA** **TEOLOGI POLITIK KRISTEN:**  
**ANALISIS ETIS** **TEOLOGIS KETAATAN KEPADA PEMERINTAH**



## Noh Ibrahim Boiliu

Artikel ini merupakan pengembangan dan ringkasan dari skripsi yang ditulis oleh penulis pada Program Stratum Satu Teologi di STT Sangkakala, Salatiga

### Pendahuluan

Kehadiran gereja di dalam dunia sebagai alat memperkenalkan Tuhan kepada yang belum mengenal Tuhan merupakan tujuan Tuhan atas gereja di dalam dunia. Dengan tujuan ini, tentu tugas gereja bersifat spiritual. Hal ini tentu menjadi landasan bagi kalangan tertentu untuk melihat peran gereja dalam konstelasi dunia hanya semata bersifat spiritual. Pandangan semacam ini hanya akan membawa gereja pada tugas yang parsial sehingga gereja seolah menarik diri dari kancah dunia bahkan menarik diri dari tugas-tugas yang sebetulnya merupakan bagian dari tugas gereja di dalam dunia. Jika ini yang terjadi maka “ibadah harus dinilai sebagai hobi yang tidak berguna, malah merugikan. Akan tetapi, bila transendensi benar-benar dipandang sebagai eksistensi manusia yang mendasar, maka ibadah menjadi pengungkapan hakiki, dan bila tidak dilakukan, suatu aspek inti manusia tidak berkembang dan menjadi kerdil”.





Gereja tidak dapat menarik diri dari “dunia milik Tuhan”<sup>1</sup> dan hanya mengurus urusan transenden saja. Apabila gereja bertindak demikian, gereja dalam hal ini pemeluknya hanya sebagai orang yang sia-sia mencari Tuhan. Ini berarti “gereja berada di dunia namun berorientasi transenden”. Di sinilah gereja harus memperlihatkan tanggungjawabnya baik tanggung jawab etis, politis, social, dan lain-lain.

Tanggungjawab gereja inilah yang harus dilihat sebagai peran etis gereja di di tengah-tengah dunia, di sini jugalah, gereja memainkan teologi moral. Sebab,

“teologi moral berbicara tentang perilaku manusia dalam pelbagai bidang dan situasi kehidupan manusia”.<sup>1</sup> Di wilayah teologi moral inilah “(wilayah normatif)”<sup>1</sup> inilah gereja diperhadapkan pada berbagai pilihan, baik membangun hubungan dengan Negara, ketundukan pada pemerintah, etika politik bagi orang Kristen, Hak-hak Asasi Manusia, Ketaatan kepada Pemerintah, dan lain-lain.

Dalam membahas ketundukan orang Kristen terhadap pemerintah, persoalan yang muncul adalah apakah orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah tanpa syarat ataukah bersyarat. Hal ini menjadi problematic, tidak tunduk maka akan disebut sebagai musuh Negara atau pemberontak. Dalam hal ini pun sebetulnya bukan persoalan boleh atau tidak boleh tunduk (mengingat domain etika) melainkan ketundukan seperti apakah yang harus dilakukan. Meski harus diingat bahwa persoalan sikap etis Kristen tidak hanya seputar persoalan politis semata.

Ketundukan orang Kristen adalah “sejauh tidak bertentangan dengan iman Kristen yang bersumber pada Alkitab, hal ini oleh Eka Darmaputera disebut sebagai “ketidaktaan yang bertanggungjawab”. Memang orang yang tidak tunduk disebut sebagai orang tidak taat namun ketidaktaan orang Kristen adalah ketidaktaatan yang bertanggungjawab. Sebab orang Kristen tidak tunduk kepada pemerintah jika hal atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertentangan dengan imannya.

### **Dasar Etika Teologi Politik dalam Perjanjian Lama**

Perjanjian Lama, kisah Daniel dan sahabat-sahabatnya memberi catatan

berkaitan dengan sikap terhadap pemerintah. Sikap Daniel jelas, sebab titah raja bertentangan dengan keayakinannya. Isi titah raja menjadi alasan penolakan untuk beribadah kepada raja.

Sikap Daniel dan sahabat-sahabatnya harus dilihat dalam sudut pandang nasioanl bukan perorangan. Ini berarti etikanya bukan etika perorangan. Sebab dalam Perjanjian Lama, YHWH menuntut ketundukan mutlak kepadaNya, “dengarlah hai orang Israel, Allah kita Esa-ekhad”.<sup>1</sup>

Jika kita memperhatikan tema ini dalam sudut pandang Yudaisme, orang Yahudi dapat menelaah hal tersebut di dalam *halakhah*. *Halakhah* “is the formulatioan of the normative law of Judaism in its initial statement, set foth in the *mishnah*”. Pencarian teologi terhadap halakhah akan mengarahkan untuk melihat sisi hukum normative Yudaisme.

Torah merupakan bagian daripada *halakhah* maka secara normatif, Israel tidak dapat berpaling kepada ilah yang lain. Israel dipanggil untuk tunduk di bawah kekuasaan Tuhan, “in halakhah, Israel must be serve God and make be the rules of the ordinary life under God’s dominion”. Pesan yang harus diterima Israel adalah bahwa Allah itu Esa-ekhad. “this is the Jewish vision. And, the most articulate expression of Yahweh’s universal rule...here the universal rule...Yahweh’s universal dominion



Pesan yang harus diterima Israel adalah bahwa Allah itu Esa-ekhad. *“this is the Jewish vision. And, the most articulate expression of Yahweh’s universal rule...here the universal rule...Yahweh’s universal dominion over all peoples is connected to a sense of moral justice”*. Visi Yahweh membuat Israel tunduk secara mutlak. Hanya Yahweh saja yang harus disembah, tidak kepada ilah lain atau kepada kuasa-kuasa lain (raja asing/*foreign kings*) yang terejawentahkan dalam pemerintahan dunia.

Panggilan YHWH atas Israel untuk menjadikan torah sebagai acuan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara merupakan panggilan normatif. Inipun hubungan yang normative dan ada di dalam perjanjian atau kovenan (*berith*) dengan Tuhan.

Dalam torah (pentateukh), Israel dapat membangun hukum bangsa (*nation*), agama, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pentateukh menjadi sumber referensi dalam membangun hukum dan etika (*law and ethic*). John Barton mengungkapkan hal ini pada bagian *“law and the ethic content of the pentateukh,”*<sup>1</sup> bahwa para teolog telah membangun konsep etika teologi.

Dengan demikian, konsep etika teologi Israel berpusat pada misnah, Talmud, dan torah, memberikan wawasan tentang “Israel sebagai paradigm paradigma Allah”.



Sehingga Israel tidak dapat membangun hubungan dengan bangsa lain jika tidak diizinkan Yahweh. Ini pun menuntut ketundukan mutlak yang ditunjukkan dalam loyalitas kepada Yahweh yakni melalui kehidupan Israel di tengah-tengah bangsa lain yang non Yahwis bahkan di dalam regulasi pemerintahan Israel. Ketika Musa menerima sepuluh perintah Allah, sesungguhnya bangsa Israel telah berada dalam ikan janji. Yang mana dalam dua bagian loh batu itu, kedua-duanya menekankan Tuhan sebagai sumber moral yang harus direalisasikan dalam hubungan dengan sesama. Penerimaan sepuluh hukum itu pun menuntut ketaatan dan ketundukan. *The content of the covenant was a set of laws or regulation which Yahweh give to them nad which the people agreed to obey. Song long as these were obeyed, Yahweh would be their god and give to them whatever protection and security it*

Dengan memperhatikan konsep teologi politik dalam Alkitab dan Perjanjian Lama, maka jelas posisi politik luar negeri Israel, yakni hubungan bilateral dapat dibangun jika diperbolehkan oleh YHWH jika tidak maka tidak boleh. Dalam konteks politik dalam negeri, posisi Israel jelas, yakni raja yang memerintah harus tunduk tanpa syarat kepada YHWH. Dengan kata lain, rakyat bias memilih untuk tidak tunduk kepada raja bila raja tidak tunduk pada YHWH. Sebaliknya, jika raja tunduk pada YHWH maka rakyat secara mutlak tunduk kepada raja.

### **Dasar Etika Teologi Politik dalam Perjanjian Baru**

Banyak teks Perjanjian Baru yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun etika teologi Kristen. Baik ungkapan Yesus maupun Paulus. Matius 12:17 mencatat ucapan Yesus, Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!" Mereka sangat heran mendengar Dia. Bahkan dalam teks Roma 13:1-7 juga mencatat tentang hal tersebut.

Untuk mengerti konteks etika teologi politik dalam Perjanjian Baru, saya akan memilih teks Roma 13:1-7 sebagai sebuah landasan etika teologi politik atau ketaatan kepada pemerintah.

Dalam sejarah gereja, tepatnya pada masa pemerintahan kaisar Caligula, Caligula memerintahkan agar semua orang termasuk orang Kristen menyembah dewa-dewa dan mengikuti ritual-ritual agama kafir. Sikap orang Kristen pada waktu itu terhadap kaisar pun adalah jelas, yakni bertentangan dengan keyakinan. Pada masa pemerintahan Claudius, Roma menjadi negara birokrasi, dipimpin oleh pelbagai komisi dan sekretariat. Claudius memperluas hak kewarganegaraan Romawi kepada penduduk yang berkependudukan tinggi di propinsi-propinsi. Claudius berusaha keras untuk mengembalikan dominasi agama Romawi kuno dalam masyarakat seperti pada masa dulunya. Seutonius mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Claudius, orang-orang Yahudi diusir dari Roma karena beberapa kerusuhan yang terjadi "atas anjuran seorang yang bernama Chrestus". Namun, sebagai misi untuk mewujudkan pemerintahan yang birokratis,

maka “Claudius memanggil orang-orang Yahudi yang dulu sempat pernah diusir untuk datang kembali ke Roma, dan claudius juga memberokan hak kewarganegaraan kepada penduduknya”.

Latar belakang Paulus memasukkan perikop ini ke dalam suratnya adalah karena orang-orang Yahudi suka memberontak sampai ke Palestina, terutama ke Galilea. Selain daripada itu, ada golongan Zilot; mereka yakin bahwa tidak ada raja bagi orang-orang Yahudi kecuali Allah; dan tidak ada upeti yang harus dibayarkan kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Mereka juga tidak puas dengan perlawanan pasif. Mereka yakin bahwa Allah tidak akan menolong mereka kecuali mereka memulai tindakan kekerasan untuk menolong diri mereka sendiri. Tujuan mereka ialah untuk meniadakan pemerintahan sipil. Mereka tidak hanya melakukan terror terhadap pemerintah Romawi, mereka juga menghancurkan rumah-rumah dan membakar tanaman dan membunuh sesama Yahudi yang membayar upeti kepada pemerintah romawi. Dalam hal ini, Paulus sangat tidak setuju karena secara langsung berlawanan dengan sikap kristen. Namun setidaknya-tidaknya bagi sebagian umat Yahudi, Yudaisme dan untuk menjelaskan bahwa kekristenan dan kewarganegaraan yang baik berjalan bersama-sama.

sikap itu dibenarkan. Mungkin Paulus menuliskan perikop ini untuk memisahkan kekristenan dari pemberontakan sikap itu dibenarkan. Mungkin Paulus menuliskan perikop ini untuk memisahkan kekristenan dari pemberontakan

Tetapi yang lebih penting dari semua itu, pandangan Paulus tentang pemerintah adalah bahwa kekaisaran Romawi sebagai sebuah alat ilahi yang ditunjuk untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan. Jika kekaisaran itu disingkirkan maka dunia akan terpecah-belah. Secara ideal, orang-orang seharusnya diikatkan menjadi satu oleh kasih Kristen untuk bekerja dan Paulus melihat perekat yang menyatukan mereka adalah pemerintah. Paulus melihat pemerintah sebagai suatu alat ditangan Allah untuk menjaga dunia dari kekacauan. Mereka yang mengurus pemerintahan adalah orang-orang yang memainkan bagiannya dalam tugas yang besar itu.

Dalam sejarah gereja, tepatnya pada masa pemerintahan kaisar Caligula, Caligula memerintahkan agar semua orang termasuk orang Kristen menyembah dewa-dewa dan mengikuti ritual-ritual agama kafir. Sikap orang Kristen pada waktu itu terhadap kaisar pun adalah jelas, yakni bertentangan dengan keyakinan.

Dari segi analisis teks, Allah memerintahkan orang Kristen untuk taat kepada pemerintah, karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah. Allah telah mendirikan pemerintah karena di dalam dunia yang tercemar ini kita memerlukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk melindungi kita dari kekacauan dan pelanggaran hukum yang menjadi akibat wajar dari dosa.

Dalam ayat 1,2, jelas di sana tercatat bahwa **“tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya...”** “Ketaatan kepada negara merupakan suatu ketetapan dari Allah. Kata-kata pembukaan pasal ini: Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya menegaskan kewajiban seorang Kristen. Sisa selanjutnya dari kedua ayat pertama menunjukkan mengapa orang Kristen mempunyai kewajiban tersebut: Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Penyusunan kata-katanya menekankan baik pemegang jabatan maupun jabatan tersebut. Tidak disebutkan di sini tentang bentuk pemerintahan. Nas ini menekankan pemerintahan itu sendiri serta para penyelenggaranya bila mereka berfungsi dengan benar. Menentang kekuasaan pemerintah berarti menentang ketetapan Allah. Orang-orang yang menentang akan terkena hukuman”.

Seperti juga yang diungkapkan Hegelberg, bahwa teologi politik yang dibangun Paulus jelas bahwa harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah...”sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah”.

### **Etika Teologi Politik Kristen dalam Konteks Indonesia**

Dalam konteks Indonesia, tidak tunduk kepada pemerintah, itu salah, baik secara hukum maupun etika (tindakan makar) tetapi memberi perintah atau aturan yang melarang pemeluk agama tertentu untuk beribadah pun merupakan suatu tindakan melawan hukum dan etika (Bandingkan: UUD 1945 pasal 29 ayat 2,

### Daftar Pustakan

- Audi, Robert, *Agama dan Nalar Sekuler Dalam Masyarakat Liberal*,  
Yogyakarta : UII Pres, 2002
- Boiliu Noh Ibrahim, *Sikap Etis Politis Orang Kristen Terhadap Pemerintah Berdasarkan Roma 13:1-7. Skripsi*, Salatiga: Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, 2007.
- Borton, John (Ed), *The Cambridge Companion to Biblical Interpretation*, New York: Cambridge University Press, 2003
- Brownle, Malcolm *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia 2007
- Gnuse, Robert, Karl, *No Other Gods. Emergent Monotheism in Israel*, England: Sheffield Academic Press, 1997
- Hegelberg, Dave, *Tafsiran Roma*, Bandung: Kalam Hidup, 2000
- Heinz, Karl, Peschke, *Etika Kristen, jilid II. Kewajiban Moral dalam Hidup Keagamaan*, Ledalero: Ledalero, 2003
- Neusner, Jacob *Theology of Halakhah*, Koln: Brill Reference Library, 2001
- Patterson, Charles H. *The Philosophy of the Old Testament*, New York: Ronald Press Company, 1953
- Sairin Wenata dan J.M. Pattiasina, *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994
- Suzeno, Frans, Magnes, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Suzeno, Frans, Magnes, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 2001
- Tenney, Meril, C. *Survei Perjanjian Baru*, Malang: Gandum Mas, 2007
- Verkuyl, J. *Etika Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007
- Pfeiffer, Charles, *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, Malang: Gandum Mas, 2008
- Wright, Christopher, *Hidup Sebagai Umat Allah. Etika Perjanjian Lama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003
- \_\_\_\_\_, *Bingkai Teologi: Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Pandangan (Kristen Protestan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu). Sebab pembatasan kebebasan dapat dilakukan “melalui kewajiban dan larangan”.

Sekalipun seperti apa yang disebut Darmaputera sebagai ketidaktaatan yang bertanggungjawab, namun masih menyisakkan dilema.

Dilema tersebut adalah dilema ketaatan atau kepatuhan. Ini akan muncul bila gereja berusaha untuk membatasi diri dengan tujuan agar pesan ilahi tidak terpalsukan oleh unsur-unsur dunia. Suzeno menyebutnya dengan istilah “puritanisasi”. Dilema ini bukan hanya terjadi di dalam agama Kristen namun juga di luar agama Kristen yakni agama-agama besar lainnya juga mengalami hal yang sama. Bahwa loyalitas terhadap pemerintah akan melemah bila bila loyalitas terhadap agama meningkat. Kepatuhan dan loyalitas menjadi variable yang mempengaruhi sikap pemeluk agama.

Baik gereja (juga tentu dalam konteks agama-agama besar lainnya) maupun Negara merasa berhak bahkan berkewajiban untuk menuntut kepatuhan dari warganya. Padahal warga dari kedua lembaga ini adalah sama. Dikatakan dilema karena bila Negara mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan keyakinan maka sikap ketidakpatuhan akan muncul (berarti ada pengaruh dari sikap pemerintah terhadap sikap kepatuhan orang Kristen). Hal senada juga disampaikan oleh Suseno mengenai dilema ini, bahwa: dilema kepatuhan antara agama dan Negara dapat menjadi tajam apabila Negara diselenggarakan berdasarkan sebuah ideology yang harus diadopsi oleh semua anggota masyarakat. Karena ideology adalah sesuatu yang disamping kepatuhan juga menuntut suatu kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah wewenang khas agama. Maka masalah ideology juga merupakan masalah hubungan antara Negara dan agama”.

Sebagai seorang warga gereja yang juga “warga kerajaan Allah”, ajaran Tuhan Yesus menjadi tolak ukur dalam menentukan sikap. Perintah akan dijalankan bila bertentangan dengan hati nuraninya dan terlebih pada sisi imaniahnya.

Jalan keluar yang ditempuh tidaklah mudah. Namun harus diingat bahwa tentu ada sisi-sisi positif yang dalam hemat penulis pada masalah-masalah tertentu, gereja dan Negara dapat membangun hubungan. Dan inipun merupakan bentuk sikap etis Kristen terhadap pemerintah.

## Gereja dan Negara: Dua Entitas yang Berhubungan Secara Inheren

Apabila pemisahan ketat diterapkan maka keduanya sama sekali tidak berhubungan. Istilah pemisahan sebenarnya kurang tepat. Sebab sekalipun keduanya berbeda di dalam tugas tetapi pada suatu saat akan berhubungan. Masalah yang terjadi dalam gereja pada lebih kurang abad IV sebenarnya adalah masalah posisi. Sebab jika berbicara mengenai posisi maka salah satu berada di atas atau lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Rupa-rupanya ini yang terjadi di dalam gereja. Oleh karena kedua-duanya merasa memiliki masa maka masing-masing mengklaim diri lebih dari yang lain sehingga muncul ide gereja-negara dan negara-gereja. Seperti yang tertera di bawah ini bahwa:

Dalam era pertengahan, ada banyak pandangan yang berebda-beda, tetapi semuanya merupakan variasi-variasi yang menekankan pada dua tema pokok ... Tema yang pertama adalah Dua Pedang (*Two Words*), yaitu adanya dua kekuasaan atau dua ruang lingkup pengaruh yang masing-masing mandiri dalam kenyataan hidup ini. “Dua Pedang” ini adalah Gereja dan Kekaisaran, yaitu kekuasaan batin dan kekuasaan lahir. Paus Gelasius I (Paus 492-496) adalah orang yang pertama kali memunculkan ide Dua Pedang ini. Tetapi juga kedudukan Gereja dianggap lebih di atas Negara dalam arti martabat atau nilai dan kedudukan negara dianggap lebih di atas dari Gereja dalam arti kekuasaan fisik dan paksaan walaupun tingkat kekuasaan tepat sama.

Dalam kenyataan historis yang ada hubungan kedua lembaga ini sering menimbulkan konflik sehingga gereja cenderung menarik diri dengan tujuan negara tidak mencampuri urusan gereja. Ini berjalan sesuai dengan pemahaman gereja akan dirinya di mana gereja sebagai lembaga yang Kudus dan am. Dengan demikian gereja ingin memisahkan diri dari negara. Namun hubungan gereja dan negara dalam negara Pancasila agak berbeda. Gereja-gereja sepakat untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Eka Darmaputera mengatakan bahwa, “pada waktu gereja-gereja mencantumkan Pancasila sebagai asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Tata Gerejanya, maka saat itu sebenarnya gereja sudah membuka kemungkinan “campur tangan” negara di dalam urusan-urusan gerejawi. Menurut UU No. 8/1985 mengenai keormasan, gereja di mata pemerintah adalah suatu organisasi masa”.

Seperti yang dikatakan oleh Darmaputera bahwa memang agak sulit untuk menentukan hubungan yang pas. Jadi, sebenarnya masalah yang terjadi dalam gereja pada abad-abad pertengahan bukan masalah hubungan gereja negara melainkan perebutan posisi atau kedudukan dalam hal ini kekuasaan.

Di bawah ini adalah hubungan-hubungan yang dibangun antara gereja dan negara. Pemahaman seperti ini juga mempengaruhi pola pikir beberapa orang di mana apabila ada orang Kristen yang duduk dalam anggota dewan, maka akan berasumsi bahwa orang Kristen tidak kalah atau bisa memperjuangkan atau membawa aspirasi orang Kristen dalam rapat-rapat dewan. Padahal belum tentu kehadiran anggota dewan dimaksud untuk memperjuangkan, mungkin ada tetapi jika diurutkan bisa saja bukan pada urutan pertama. Ini sebenarnya adalah suatu pertimbangan etis. Sebab seorang warga gereja berada di DPR itu berfariasi motivasi. Gereja perlu menyadari hal ini agar tidak kecewa bila kepentingan-kepentingan warga gereja tidak diperjuangkan.

Memang agak sulit untuk menemukan hubungan yang pas (gereja-negara). Jika tidak ada hubungan yang pas, apakah gereja dan negara dipisahkan secara total atau dengan kata lain tidak ada hubungan sama sekali? Ada beberapa teori yang akan digunakan, di mana melalui teori-teori ini kita mencoba untuk mendekati dan memahami kedua entitas ini. Maksud pendekatan dan pemahaman ini adalah agar dapat “merumuskan inter-relasi antara agama dan negara sedemikian rupa, sehingga hubungan antara keduanya memungkinkan masing-masing melaksanakan fungsinya sebagai negara, dan agama melaksanakan fungsinya sebagai agama”

Dengan demikian yang satu tidak disubordinasikan terhadap yang lain. Secara umum ada tiga teori mengenai relasi agama dan negara, di antaranya:

#### 1. Teori Subordinasi

Teori ini boleh dikata sarat konflik, karena yang satu diletakkan di bawah yang lain atau yang dikenal dengan subordinasi. Mungkin di negara - negara yang mengenal ‘agama negara-negara agama’ atau yang lazim disebut dengan ‘state religion’ dan ‘religion state,’ tidak menjadi masalah.

Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa prinsip ini sarat konflik. Sebab Indonesia memiliki lebih dari satu agama yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan tolak ukur maka antara yang satu dengan yang lain tidak boleh disubordinasikan.

## 2. Teori separasi

Pada umumnya teori ini dianut oleh negara-negara demokrasi liberal. Di mana antara gereja dan negara dipisahkan secara mutlak dengan asumsi bahwa masing-masing akan mampu melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan potensi konflik pun relatif sedikit. Sekalipun keduanya berbeda namun keduanya mempunyai misi yang sama, yakni mensejahterakan warganya. Patokan kita bukan pada minimnya masalah atau konflik namun untuk apa ada pemerintah? Pemerintah ada untuk memerintah, membawa keadilan dan sekaligus mensejahterakan rakyat. Jika ini tidak tercapai maka apa yang didengung-dengungkan oleh pemerintah mengenai kesejahteraan hanyalah slogan belaka..

## 3. Teori Koordinasi

Teori subordinansi dan separasi harus ditolak sebab tidak mencerminkan asaz bangsa Indonesia. Kedua lembaga ini otonom di dalam menjalankan fungsinya. Masing-masing mempunyai fungsi pokok. Seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa sekalipun keduanya berbeda dalam fungsi tetapi mempunyai misi yang sama pada orang yang sama.

“Oleh karena itu, tidak mungkin dan tidak benar bila harus diseparasikan secara mutlak”.

Dari ketiga teori di atas, pendekatan melalui teori koordinasi menolong semua umat beragama khususnya umat Kristiani untuk menjadi paham mengenai hubungan dan adanya hubungan secara kemitraan antara gereja dan negara. Kemitraan di sini adalah kemitraan yang setara, artinya bahwa “Negara tidak boleh memberikan pilihan kepada suatu agama atas pihak lainnya. Hal ini merupakan prinsip tentang tidak memihak. Prinsip tersebut tidak hanya mengatur tentang pendirian gereja-yang keberadaannya mungkin memunculkan argumentasi logis agar sesuai dengan prinsip kebebasan-tetapi juga melarang praktek-praktek demikian sebagai persyaratan yang sah suatu afiliasi agama tertentu sebagai suatu persyaratan bagi instansi-instansi umum”.

Di dalam negara Pancasila, baik subordinansi maupun separasi mutlak juga ditolak. Penolakan ini misalnya nyata dalam kesepakatan-kesepakatan berikut ini : (a) bahwa negara Pancasila bukan negara sekuler (sebab itu separasi total ditolak) dan bukan pula negara agama (sebab itu 'subordinansi total' juga ditolak. (b) bahwa di dalam negara Pancasila tidak ada 'negara agama' (subordinansi negara oleh agama) maupun 'agama negara' (subordinansi agama oleh negara). Pancasila memahami hubungan agama dan negara sebagai hubungan kemitraan yang setara dan timbale. Artinya bahwa negara tidak boleh memihak pada salah satu agama yang pada akhirnya mensubordinasikan salah satu agama terhadap yang lain. Sebab negara Pancasila *bukan state religion* atau *religion state*.

Teori atau prinsip koordinasi/kemitraan tidak mudah dalam penerapannya. Bahwa pendekatan melalui prinsip koordinasi tidak membuat umat Kristiani berbesar hati. Tetapi ini menjadi sulit ketika membuat suatu identifikasi dalam mayoritas. Maksudnya, secara jumlah umat Kristen adalah minor. Maka harus diwaspadai sehingga tidak terjadi subordinansi yang terselubung, ini sulit untuk diidentifikasi. Robert Audi menjelaskan bahwa, "pilihan-pilihan keagamaan, pemerintahan apapun untuk suatu agama tertentu, bagaimanapun juga, menciptakan sebagian besar tendensi bagi kekuasaan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang terhadap pengidentifikasian dengan agama yang dipilih, khususnya jika menyangkut pengidentifikasian terhadap mayoritas warga negara ... dominasi kekuasaan dalam kelompok-kelompok suatu agama dengan mudah merusak demokrasi, yang pada warga negara harus memiliki kesempatan-kesempatan yang sama untuk memperbutkan kekuasaan politik secara adil".

Di dalam negara Pancasila, subordinansi dan separasi total memang ditolak. Salah satu point dalam Inter-Religious Harmony, yakni "Harmony between religious Communities and the Government (keharmonisan di antara komunitas agama dan pemerintah)," menyebutkan bahwa:

*In the Pancasila state, subordination and total separation are also rejected. This rejection is apparent Indonesia these two consensus, I.e. (a) that the Pancasila state is nether a secular state (hence, the idea of a total separation is rejected), nor a religious state (hence, the idea of a total subordination is also rejected); (b) that Indonesia the Pancasila state there is neither a 'religious state' (subordination of the state to religion) nor a 'state religion' (subordination of religious to the state).*

Bahwa di dalam negara Pancasila, model subordinansi dan separasi total adalah juga ditolak. Karena total separasi lebih merujuk pada sekuler sedangkan subordinansi itu, yang satu disubordinasikan terhadap yang lain seperti: agama - negara (*religious - state*) adalah subordinansi agama terhadap negara dan negara - agama (*state - religious*) adalah subordinasi negara terhadap agama.

## Kesimpulan

Oleh karena itu perlu diwaspadai bahwa ketika pemerintahan dipimpin oleh pemimpin yang tidak menerapkan asas-asas demokrasi dengan baik yakni dengan mensubordinasikan yang lain (secara terselubung) maka akan merusak demokrasi. Pintu perebutan kekuasaan pun terbuka. Namun yang disayangkan adalah sebagian umat Kristen merasa riskan dengan politik. Politik merupakan jalan menuju kekuasaan.

Di dalam Perjanjian Baru “Agama (Kristen) dan negara merupakan dua fenomena yang berbeda. Orang Kristen (gereja awal) tidak bernegara dan tidak hidup di dalam satu batas kenegaraan yang sama. Ada pemisahan antara kekristenan (gereja) dengan “negara”.”

Dengan demikian maka tidak menolong orang Kristen untuk memahami konteks sosialnya. Ini berbeda dengan Perjanjian lama. “Agama dan negara dalam konteks Perjanjian Lama menyatu dalam satu realitas social. Yahwisme adalah bentuk kehidupan beragama yang jatuh sama dengan kehidupan social-politik kerajaan di Israel. Dapat dikatakan bahwa kehidupan bernegara dan beragama terjadi dalam suatu kesatuan. Di sinilah agama berfungsi secara kritik terhadap kehidupan social, walaupun agama juga bisa mengintegrasikan kehidupan social itu”.

Dalam pemahaman semacam ini hendaknya tidak menarik dan menutup diri terhadap politik. Politik itu baik jika dijalankan sesuai dengan aturannya. Satu contoh sejarah di dalam Alkitab, ketika terjadi pembuangan di Babel, di mana seluruh rakyat dibuang ke Babel maka Yerusalem tidak dapat melepaskan diri dari kevakuman politik. Ini juga terlihat ketika waktu pemulangan, terjadinya pro-kontra diantara orang-orang buangan.